

TESIS

**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
MAJELIS RAKYAT PAPUA MENURUT
OTONOMI KHUSUS PAPUA**



SOFIA BONSAPIA
No.Mhs. : 07.1164/PS/MIH

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2008**

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis dengan judul : “ Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua menurut Otonomi Khusus Papua” adalah benar-benar hasil karya asli penulis sendiri, dan bukan merupakan kutipan atau duplikasi dari karya tulis orang lain yang telah ada sebelumnya. Kecuali kutipan-kutipan dari buku-buku, dan penulis telah memberitahukan sumbernya.

Yogyakarta, September 2008

SOFIA BONSAPIA

INTISARI

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang MRP sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Penelitian ini juga bertujuan mengetahui Perlindungan MRP terhadap hak-hak dasar orang asli Papua. Faktor-faktor yang merupakan kendala atau hambatan MRP dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang ada kaitannya dengan penulisan tesis ini, dan wawancara dengan beberapa narasumber untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan penulisan tesis ini.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus di Papua di bentuk MRP yang merupakan representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang MRP belum dapat dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Akibatnya MRP belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua. Hal ini tampak pada lambannya Pemerintah Provinsi dan DPRD membentuk Perdasus yang mengatur teknis operasional Pelaksanaan Tugas dan Wewenang MRP dan sejumlah tugas dan wewenang MRP yang diamanatkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, baru 2 (dua) yang dapat di laksanakan yaitu pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRD, dan pertimbangan dan persetujuan MRP terhadap Perdasus yang dibentuk oleh Gubernur bersama DPRD yaitu Perdasus tentang Pembagian Dana Otsus dan Perdasus tentang Pendidikan.

Kata- kata kunci : Otonomi Khusus, Majelis Rakyat Papua, Hak-hak Orang Asli Papua.

ABSTRACT

This research intended to know the implementation of task and obligation of MRP obediently to the mandate of the Law Number 21 of 2001 on Special Autonomy for Papua Province. This research did intended to know the protection of MRP to the basic rights of Papua indigenous, and the factors becoming the barriers or obstacles of MRP in conducting its task and obligation.

This research was conducted by tracing the regulations and various literatures that has relation to this thesis writing, and interview with some source persons for gaining input in order to perfecting this thesis writing.

In order to implement special autonomy in Papua, it was formed MRP that is the cultural representative of Papua indigenous, that has certain authority in the pace of protecting the Papua indigenous' right, underlying to the esteem to the esteem to the custom and culture, female outsourcing, and the consolidation of religious life concordance.

The result of this research showed that the implementation of task and obligation of MRP have not been conducted consequently and consistently. The result, MRP has not fully give protection to the basic right of Papua indigenous. It seems on the slowness of Provincial Government and DPRD in forming Special Regional Regulation that rule on operational technique of the implementation of task and obligation of MRP and some duties and authorities of MRP that is amended in the Article 20 paragraph (1) in Law Number 21 of 2001 on Special Autonomy to Papua Province, there are only 2 (two) that could be implemented, i.e. the consideration and approval toward the candidate of Governor and Vice Governor nominees that was proposed by DPRD, and consideration and approval of MRP to the Special regional Regulation that was formed by the Governor along with DPRD, i.e. Special regional Regulation on the Distribution of Special Autonomy Fund and Special regional Regulation on Education.

Keywords : Special Autonomy, Papua Society Council (MRP), Right of Papua Indigenous.

KATA HANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Gagasan yang melatari tajuk permasalahan ini timbul dari hasil pengamatan penulis mengenai perlindungan Majelis Rakyat Papua terhadap hak-hak dasar orang asli Papua. Tesis dengan judul : “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang MRP menurut Otonomi Khusus Papua”, bertujuan untuk mengetahui problematika yang menyebabkan MRP belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam rangka penyusunan tesis ini, yang hanya berkat bantuan berbagai pihak, maka tesis ini selesai pada waktunya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada :

1. JKH. Roembiak, SH., M.Hum, Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua, yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Prof. Dr Dra. MG Endang Sumiarni, SH., M.Hum, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum selaku Dosen Pembimbing I, yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu memberikan bimbingan dan perhatian sampai penyelesaian penulisan tesis ini.

3. B. Hestu Cipto Handoyo, SH., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta selaku Dosen Pembimbing II, yang juga dalam kesibukannya masih meluangkan waktu memberikan bimbingan dan perhatian sampai penyelesaian penulisan tesis ini.
4. Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
5. Suami tercinta, Jefri Repasi dan buah hati penulis, Bill Jhons, Lindert dan Angela Repasi, yang penuh kasih sayang dan yang mewarnai semangat penulis meraih gelar Magister Humaniora.
6. Titip salam buat Papaku Yosef Bonsapia (Alm) di seberang sana, dan Mamaku terkasih Agustina Mirino yang selalu setia memanjatkan doa kepada Tuhan Yesus, sehingga saya boleh meraih gelar Magister Humaniora.
7. Ka' Alfred Repasi dan kedua anak Olivia, Mark dan Adik Kartini, Hegen dan anak Ricky yang sudah menjaga dan menemani anak-anak selama penulis mengikuti pendidikan di Yogyakarta
8. Sobat-sobatku seataap Magdalena Maturbongs, Abner Kehek, Subani dan Juadi, juga Filep Wamafma, dan adik Heunike Nap yang selalu berbagi suka dan duka.
9. Seluruh Pegawai Biro Hukum SETDA Provinsi Papua, special buat Ibu Rosina Upessy, kaka Decky Hegemur, adik Ferdinand Labatar, mas Bambang, mas Herman Kuswidarto, dan adik Natalis Manufandu yang banyak memberikan motivasi selama penulis mengikuti pendidikan.

10. Mereka yang namanya tidak disebutkan tetapi telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Demikian Karya Ilmiah Penelitian Tesis ini, semoga bermanfaat bagi yang membacanya.

Yogyakarta, September 2008

SOFIA BONSAPIA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
INTISARI	vi
ABSTRACT	vii
KATA HANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
a. Rumusan Masalah	11
b. Batasan Masalah	11
c. Keaslian Penelitian	13
d. Manfaat Penelitian	16
B. Tujuan Penelitian	17
C. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Hukum	19
1. Otonomi Daerah	19
2. Negara Hukum	24

B.	Teori Negara Kesatuan dan Pemerintahan Daerah	30
C.	Otonomi Khusus.....	42
D.	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang MRP	46
BAB III	METODE PENELITIAN	50
A.	Jenis Penelitian	50
B.	Pendekatan Hukum	50
C.	Bahan Hukum	51
D.	Analisis Hukum	53
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A.	Hasil Penelitian	57
B.	Kedudukan MRP dalam Sistem Pemerintahan	63
C.	Hubungan Kerja MRP dengan Lembaga Lainnya	64
D.	MRP sudah melaksanakan Tugas dan Wewenangnya sesuai Amanat Otonomi Khusus Papua	69
E.	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang MRP benar-benar sudah memberikan Perlindungan Terhadap Hak-hak Dasar Orang Asli Papua	77
F.	Faktor-Faktor yang merupakan Kendala atau Hambatan MRP dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya.....	82
1.	Hambatan Yuridis	82
2.	Hambatan Operasional	86

BAB V	PENUTUP	89
	A. Kesimpulan	89
	B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA		91
LAMPIRAN		93
	I. Peta Daerah Pemilihan Anggota MRP	94
	II. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua	95